CROWDSOURCING: ARSIP, MEMORI KOLEKTIF, DAN ERA DIGITAL

CROWDSOURCING: *ARCHIVES, COLLECTIVE MEMORY AND DIGITAL ERA*

Harry Bawono
Arsip Nasional Republik Indonesia
Jl. Ampera Raya No. 7, Cilandak, Jakarta Selatan 12560
Email: *feuerbaw@gmail.com*

Abstract

Since 2012, National Archives of Indonesia has been developing National Archival Information System (SIKN) and National Archival Information Network (JIKN). Both platform provide easier access to archival records and in turn connect the local archives as their hubs. Crowdsourcing enriches the networks and increasing societal participation. This research had been conducted from January to April 2019 by using qualitative methods through interviews. This article argues that crowdsourcing is very helpful for adding archival collection.

Keywords: Archives, Integration Collective Memory, Public Participation, Crowdsourcing, Digital Era

Abstrak

Sejak 2012, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mengembangkan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN). Kedua platform menyediakan akses yang lebih mudah. Crowdsourcing memperkaya jaringan dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Penelitian ini berlangsung pada Januari-April 2019 dengan menggunakan metode kualitatif melalui wawancara. Artikel ini bersimpulan bahwa crowdsourcing berguna bagi penambahan khazanah.

Kata Kunci: Arsip, Integrasi Memori Kolektif, Partisipasi Publik, *Crowdsourcing*, Era Digital

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan penghuni sekitar 267 juta jiwa (katadata, 2019). Penduduk di Indonesia tersebar di 34 Provinsi, 516 Kabupaten/Kota, 7.024 Kecamatan, 8.479 Kelurahan, dan 74.953 Desa (Pajata, 2018). Dalam kondisi yang demikian itu, Indonesia menyimpan beranekarupa budaya, agama, etnis dan juga ras. Dalam konteks sosio-demografis tersebut, Arsip Nasional RI (ANRI) tumbuh dan berkembang.

ANRI menjalankan perannya dengan dibantu oleh institusi arsip daerah provinsi, kabupaten/kota dan arsip perguruan tinggi (university archives) (UU No.43/2009, Pasal 16, ayat 3). Relasi antara ANRI dan institusi arsip provinsi,

kabupaten/kota, serta arsip perguruan tinggi tidak bersifat subordinatif, melainkan hanya bersifat koordinatif. Kendati demikian, ANRI memiliki tugas untuk membina institusi arsip daerah baik provinsi ataupun kabupaten/kota serta arsip perguruan tinggi dan juga unit kearsipan pemerintah pusat agar mereka menjalankan sistem pengelolaan arsip sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh ANRI/Negara (UU No.43/2009, Pasal 8, ayat 1).

Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi ANRI untuk dapat menjalankan fungsi bidang kearsipan secara optimal optimal. Semua program yang dikeluarkan oleh ANRI tidak otomatis diikuti oleh institusi arsip daerah maupun arsip perguruan tinggi. Namun, dibutuhkan kesukarelaan dari keputusan tiap-tiap institusi arsip daerah, arsip perguruan tinggi maupun agensi pencipta untuk bersedia bergabung.

Dalam menjalankan fungsi organisasinya, ANRI berpedoman pada visi "Arsip sebagai pilar *good governance* dan integrasi memori kolektif Bangsa" (Perka ANRI No.40/2015). Dalam artikel ini secara khusus hanya akan dibahas tentang integrasi memori kolektif bangsa. Salah satu cara mewujudkan visi tersebut, ANRI membangun Sistem Informasi Kearsipan Nasional-Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (SIKN-JIKN). Pematangan konsep sistem ini sendiri berlangsung sejak dikeluarkannya Undang-Undang Kearsipan tahun 2009. Konsep ini kemudian dikonkretkan menjadi sebuah sistem pada 2012 (Pratiwi, Tanpa Tahun). Semangat yang mendasari ANRI mengkonkretkan sistem ini, selain UU Kearsipan 2009 adalah UU Keterbukaan Informasi Publik 2008 dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik 2008 (Pratiwi, Tanpa Tahun). Baik sistem dan kerangka regulasi ini dikembangkan sebagai refleksi dari kesungguhan pemerintah Indonesia dalam menangkap semangat zaman ketika itu dan saat ini yang semakin mengalami otomasi dan digitalisasi. Otomasi dan digitalisasi di Indonesia semakin giat sejak 2003 dengan digulirkannya program *e-Government* melalui Inpres Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* 2003.

SIKN-JIKN, yang sejak 2017 mengadopsi teknologi AtoM (*Access to Memory*), secara khusus dikembangkan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses arsip yang tersedia di institusi arsip dimanapun. Karena melalui SIKN-JIKN ini dikonsepkan bahwa semua institusi arsip di negara ini akan terhubung dalam satu jaringan digital. Dalam SIKN-JIKN, ANRI berposisi sebagai pusat jaringan, sementara institusi arsip lainnya berposisi sebagai simpul jaringan. Dalam posisi sebagai pusat jaringan, ANRI bertanggungjawab atas kelancaran bekerjanya SIKN-JIKN dan mendorong institusi arsip untuk bergabung sebagai simpul, serta juga pengembangan SIKN-JIKN agar mengalami perkembangan positif melalui inovasi-inovasi tertentu. Sementara, posisi institusi arsip sebagai simpul jaringan harus aktif menginput koleksi arsipnya ke

dalam sistem digital agar dapat "dipanen" oleh SIKN-JIKN.

Upaya pengintegrasian memori kolektif melalui SIKN-JIKN bukan perkara mudah. Banyak permasalahan yang harus dihadapi oleh ANRI dalam upayanya tersebut, setidaknya terdapat 2 (dua) permasalahan, filosofis dan teknis. Permasalahan filosofis berkaitan dengan klaim integrasi memori kolektif itu sendiri. Sejauh ini memori kolektif dalam perspektif institusi arsip di Indonesia masih di dominasi oleh memori kolektif yang negara-sentris. Sementara, memori kolektif mengandaikan representasi dan representasi erat kaitannya dengan partisipasi publik (Assman, 2008).

Berkaitan permasalahan teknis, ketika sebuah arsip tekstual mengandung bahasa asing tertentu, seperti bahasa cina dan bahasa arab melayu, arsiparis di ANRI dan umumnya arsiparis di Indonesia akan kesulitan mendeskripsikannya, karena keterbatasan kemampuan bahasa. Kemampuan bahasa asing arsiparis di Indonesia selama ini didominasi oleh bahasa Belanda dan Inggris. Kondisi ini tentunya akan membuat hasil deskripsi terhadap arsip itu pun menjadi kurang sempurna. Kondisi ini juga akan mempengaruhi kualitas informasi yang didapat oleh pengakses, seharusnya mereka mendapatkan informasi unik dalam arsip tersebut, namun tidak bisa.

Kedua permasalahan tersebut, filosofis dan teknis, tentunya perlu juga dipandang sebagai tantangan yang harus di jawab oleh institusi arsip, khususnya ANRI. Karena ketika permasalahan tersebut tidak ditemukan solusinya, maka hal ini akan menghambat capaian visi ANRI sebagai institusi yang memiliki tujuan menjadikan arsip sebagai integrasi memori kolektif bangsa.

Berkaitan dengan dua permasalahan tersebut, institusi lainnya dapat dijadikan contoh yang relevan, dalam tulisan ini penulis hanya akan mendeskripsikan dua institusi, Arsip Nasional Singapura dan *Latter-Day Saints Church* (*LDS Curch*). Arsip Nasional Singapura menjalankan program *Citizen Archivist* yang salah satu contohnya dapat membantu mendapatkan informasi atas arsip foto yang sulit teridentifikasi, selain itu juga membantu melakukan transkripsi terhadap berbagai arsip tekstual tulisan tangan sehingga informasi di dalam arsip tersebut lebih mudah diakses oleh publik. Sementara itu, *LDS Church* menjalankan program familysearch melalui *familysearch.org* yang memungkinkan siapa pun berkontribusi data keluarganya dan kemudian publik dapat dengan mudah menelusuri data geneologi mereka dalam sistem tersebut. Melalui sistem ini, *LDS Church* tercatat sebagai institusi penghimpun data geneologi terbesar di dunia (familysearch, 2019). Hingga tahun 2019, tercatat sekitar 6 milyar nama yang tersimpan dalam basis data LDS Church melalui perangkat *familysearch.org* ini (familysearch, 2019). Kedua institusi ini memanfaatkan "teknologi *crowdsourcing*" yang memungkinkan partisipasi publik dapat optimal sehingga relatif mampu menjawab permasalahan filosofis dan teknis sebagaimana yang dialami juga oleh institusi arsip di Indonesia.

Uraian tersebut menggenapkan penjelasan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh ANRI akan menghambat pencapaian visi, integrasi memori kolektif bangsa, jika tidak ada upaya untuk mengatasinya. Namun, persoalannya solusi yang dilakukan oleh pihak lain memerlukan upaya kontekstualisasi agar dapat direplikasi dan sesuai konteks Indonesia. Melalui penelitian dalam artikel ini, peneliti mengupayakan munculnya alternatif solusi sehingga diharapkan dapat membantu ANRI mengadaptasi cara-cara yang sudah pernah dilakukan oleh pihak lain dalam mengatasi permasalahan tersebut. Dengan begitu ANRI pun dapat terbantu dalam menggenapi visinya.

Hasil penelitian ini pernah dipresentasikan dengan judul *"Crowdsourcing Technology as a Strategy to Develop Archives as a Pillar for Integrating the Collective Memory of the Nation in Digital Era: a Proposal to Strengthening the Indonesian Archival Information System"*dalam forum Sarbica International Symposium pada 24-27 Juni 2019 di Arsip Nasional Singapura.

Berdasarkan uraian tersebut maka persoalan yang akan dianalisa dalam artikel ini adalah "Bagaimana konsep *crowdsourcing* dapat menjadi alternatif solusi yang relevan untuk mengatasi permasalahan filosofis dan teknis yang dihadapi oleh ANRI dalam mewujudkan visi integrasi memori kolektif bangsa?".

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep *crowdsourcing* sebagai alternatif solusi yang relevan untuk mengatasi permasalahan filosofis dan teknis yang dihadapi oleh ANRI dalam mewujudkan visi integrasi memori kolektif bangsa.

Kerangka konsep yang digunakan dalam artikel ini adalah:

a. Arsip

Dalam definisi Lundgren dan Carol, arsip adalah bukti dari peristiwa (*event*) atau aktivitas yang terekam dalam media fisik dan dapat ditemukan kembali (Lundgren & Lundgren, 1989). Selain itu, arsip juga dapat bermakna institusi kearsipan. Dalam artikel ini yang dimaksud institusi kearsipan adalah institusi arsip nasional, arsip daerah provinsi/kota, maupun arsip perguruan tinggi. Disamping sebagai fisik dan institusi, konsep arsip juga merujuk pada sebuah media yang menjadi lokus kekuatan sosial bernegosiasi, berkontestasi dan juga saling mengkonfirmasi (Cook & Schwartz, 2002).

b. Memori Kolektif

Merujuk pada Halbwachs, memori kolektif adalah sebuah rekonstruksi dari masa lalu yang mengadaptasi fakta lampau yang digunakan baik untuk kebutuhan kepercayaan maupun spiritual saat ini (Neiger, et al., 2011). Terdapat 5 (lima) karakteristik memori kolektif (Neiger, et al., 2011):

1) Memori kolektif adalah produk kontruksi sosial-politik;
2) Proses kontruksi memori kolektif berlangsung terus menerus, terjadi melalui proses multidireksional;

Tabel 1. Data Informan

NO	IDENTITAS INFORMAN	JABATAN	WAWANCARA
1	A	Fungsional	8 Februari 2019
2	B	Fungsional	14 Mei 2019
3	C	Struktural	31 Mei 2019
4	D	Struktural	22 Mei 2019
5	D2	Struktural	22 Mei 2019
6	E	Fungsional	26 April 2019
7	F	Fungsional	10 Juni 2019

Sumber: Data diolah oleh Penulis

3) Memori kolektif bersifat fungsional;
4) Memori kolektif harus dapat diwujudkan secara konkret;
5) Memori kolektif bersifat narasional.

c. Sistem Informasi Kearsipan Nasional – Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (SIKN – JIKN)

Sistem informasi kearsipan nasional (SIKN) adalah sistem informasi arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI yang menggunakan saranan jaringan informasi kearsipan nasional (UU No.43/2009, Pasal 1, nomor 29). Jaringan informasi kearsipan nasional (JIKN) adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI (UU No.43/2009, Pasal 1, nomor 30).

d. Crowdsourcing

Crowdsourcing adalah sebuah model bisnis yang digunakan baik oleh organisasi berorientasi laba, nirlaba, pemerintahan maupun sector individual agar tercipta kolaborasi, keterlibatan, atau kontribusi yang berorientasi tugas oleh sekelompok besar pengguna yang pernah menggunakan maupun pengguna baru untuk mencapai hasil tertentu (Ellis, 2014).

e. Era Digital

Era digital dapat didefinisikan sebagai masa ketika penyebaran, penggunaan dan akses informasi siap tersedia secara elektronik dan sebagian besar terhubung dengan internet (Lau, 2003).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlangsung sejak Januari hingga April 2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui wawancara baik sengaja maupun tidak sengaja serta studi pustaka.

Terdapat 7 (tujuh) informan yang diwawancara baik sengaja maupun tidak sengaja dalam rentang waktu sejak Februari hingga Juni 2019. Informan tersebut berstatus pejabat fungsional maupun struktural yang memahami baik kebijakan kearsipan nasional, proses SIKN-JIKN ataupun pengolahan arsip. Lebih lengkap, lihat Tabel 1.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kompleksitas Mengintegrasikan Memori Kolektif Indonesia

ANRI memiliki kepentingan untuk mengkonkretkan visi jangka panjang, menjadikan arsip sebagai simpul pemersatu bangsa. Dalam usahanya mengkonkretkan visi tersebut, ANRI mencanangkan visi perubahan pembangunan kearsipan 2015-2019 yakni "Arsip sebagai pilar *good governance* dan integrasi memori kolektif Bangsa". Salah satu misi yang akan dilakukan oleh ANRI dalam rangka mencapai visi tersebut adalah mengembangkan sistem akses dan layanan arsip melalui aplikasi sistem dan jaringan informasi kearsipan (SIKN-JIKN).

Fase perkembangan SIKN-JIKN dapat dibagi menjadi 2 (dua) periode, lama dan baru. Periode lama berlangsung dari 2012-2016 (A, 2019). Sementara, periode baru berlangsung sejak 2017 hingga sekarang (A, 2019). Periode lama ditandai dengan digunakannya sistem yang dibangun oleh Telkom (BUMN). Pada sistem ini, anggota simpul dikenakan biaya untuk menyewa *storage* bisa perbulan atau pertahun. Dalam perjalanannya, karena sistem dinilai tidak sustainable, terlalu bergantung pada *developer* (pengembang), serta kurang fleksibel (A, 2019). Maka pada tahun 2016 dipersiapkan untuk perubahan sistem. Perubahan sistem ini kemudian terjadi pada 2017. Pada fase lama, ANRI berhasil merekrut 74 simpul yang terdiri baik institusi arsip maupun institusi pencipta. Rincian lihat Tabel 2.

Memasuki periode baru, sistem yang dibangun oleh Telkom kemudian diganti dengan sistem yang menggunakan mesin AtoM (*Access to Memory*). AtoM adalah sistem yang diinisiasi oleh ICA sejak tahun 2008 dan dikembangkan oleh *Artefactual Systems*. AtoM merupakan aplikasi open source berbasis web yang menyediakan fasilitas deskripsi dan akses terhadap akses sesuai dengan standar dalam lingkungan multi-bahasa dan multi-repositori (Pratiwi, 2018). Semenjak menggunakan sistem baru ini, simpul tidak lagi dikenakan biaya sebagaimana sistem lama. Pada fase baru dari tahun 2017 hingga 2019 terdapat 113 simpul telah bergabung dalam SIKN-JIKN. Rincian lihat Tabel 3.

Dari data 2012-2019 tercatat total simpul yang bergabung adalah 187 atau 17,9% dari total potensi 1040 simpul. Hingga saat ini, ANRI terus berupaya untuk menjaring simpul sehingga tercapai total 1040 simpul kedepannya.

Persoalan mendasar yang dihadapi oleh tim SIKN-JIKN dalam memapankan sistemnya adalah eksosistem di organisasi simpul. Secara teori dan praktis, kelancaran beroperasinya SIKN-JIKN sangat

Tabel 2. Data Jumlah Simpul 2012 - 2016

TAHUN	2012*	2013	2014	2015	2016	TOTAL
Jumlah	0	2	11	21	40	74

*pembangunan sistem

Sumber: Data Pusat SIKN-JIKN ANRI

Tabel 3. Data Jumlah Simpul 2017 - 2019

TAHUN	2017	2018	2019	TOTAL
Jumlah	62	28	23	113

Sumber: Data Pusat SIKN-JIKN ANRI

bergantung pada kesiapan eksosistem pengelolaan arsip di organisasi, yang didalamnya meliputi: kebijakan kearsipan, infrastruktur, dan sumber daya manusia, serta pendanaan.

Kondisi eksosistem pengelolaan arsip di Indonesia dapat dilacak dari Data Pengawasan dari Pusat Akreditasi ANRI periode 2016-2017. Berdasarkan Data Pengawasan tahun 2016 didapatkan bahwa dari 34 kementerian, hanya terdapat 2 (dua) atau 6% kementerian yang berstatus "baik" dalam pengelolaan arsip. Sedangkan, status 32 kementerian lainnya bersatus cukup, kurang dan buruk. Kondisi ini juga mirip dengan status Lembaga Non-Kementerian (LPNK), berdasarkan Data Pengawasan 2017, diketahui dari 28 yang dinilai hanya terdapat 2 (dua) atau 7,1% yang berstatus "baik" dan 1 (satu) atau 3,5% yang berstatus "sangat baik". Sementara itu, 25 LPNK lainnya berstatus cukup, kurang dan buruk. Begitu pun dengan kondisi Pemerintah Daerah Provinsi (Pemda Provinsi), berdasarkan Data Pengawasan 2016, dari 33 Pemda Provinsi, terdapat hanya 2 (dua) Pemda Provinsi yang berstatus "baik". Sedangkan, 31 lainnya berstatus cukup, kurang dan buruk. Kondisi ini juga mirip dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Pemda Kabupaten/Kota), Data Pengawasan 2017 mengungkap informasi bahwa dari 507 hanya 8 (delapan) atau 1% yang berstatus "baik". Sedangkan, 499 lainnya berstatus cukup, kurang dan buruk.

Guna memperbaiki ekosistem tersebut, ANRI pada 2017 mengeluarkan sebuah kebijakan tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA). Kebijakan ini bertujuan untuk menguatkan kembali komitmen segenap agensi pemerintahan dalam melakukan pengelolaan arsip yang layak (Perka ANRI No.7/2017). Pada perkembangan selanjutnya, kondisi status pengelolaan arsip di tiap agensi pemerintahan pun mengalami tren yang positif atau perbaikan dari kondisi sebelumnya, sejak 2017-2019 tiap agensi pemerintahan kembali bersemangat untuk memperbaiki diri karena dorongan dan "sanksi" dengan cara mengumumkan kondisi statusnya kepada publik. Kondisi status ini juga menjadi penting karena berdampak pada nilai reformasi birokrasi yang akan diterima oleh institusi yang bersangkutan (C, 2019). Adanya perbaikan yang positif, dan tentunya masih terus berproses hingga kini dan kedepannya, dari status pengelolan arsip agensi pemerintahan tentunya mengindikasikan pula adanya perbaikan yang positif terhadap ekosistem yang diperlukan bagi berjalannya SIKN-JIKN secara layak.

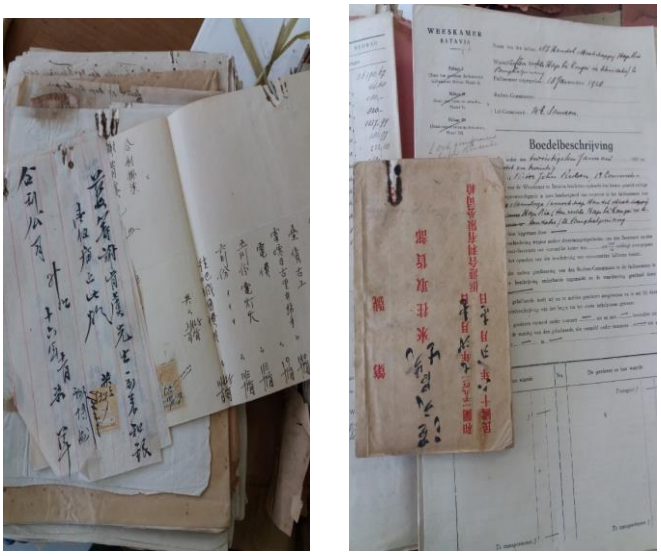

Gambar 1. Arsip *Wees-en Boedelkamers* Bertuliskan Aksara Cina
Sumber: Informan E (10 Juni 2019)

Selain usaha perbaikan ekosistem melalui gerakan tersebut, Pusat SIKN-JIKN pun menginisiasi suatu program untuk dapat mengatasi beberapa permasalahan teknis yang dihadapi mereka. Permasalahan teknis tersebut diantaranya, deskripsi arsip yang kerapkali tidak sesuai standar dan belum optimalnya pemanfaatan arsip yang ada dalam SIKN-JIKN.

Permasalahan deskripsi arsip selain banyak yang belum standar, juga berkenaan dengan arsip berbahasa asing, contohnya berbahasa Cina, seperti yang terdapat dalam *Wees-en Boedelkamers* (Arsip Hindia-Belanda, 1928). Ilustrasi dapat dilihat pada gambar 1 Arsip *Wees-en Boedelkamers* Bertuliskan Aksara Cina.

Beruntung ketika bahasa cina dalam arsip tersebut ternyata sudah diterjemahkan dalam bahasa belanda (F, 2019). Persoalannya tidak sedikit pula ditemui bahasa asing lain, seperti Jawa Kuno, Arab Melayu atau lainnya yang seringkali tidak ada bahasa terjemahannya baik dalam bahasa Indonesia, Inggris ataupun Belanda. Selain arsip tekstual, kerap pula ditemukan masalah deskripsi pada arsip foto dan audio-visual. Arsip foto dan audio-visual yang sulit terdeskripsi ini biasanya tidak memiliki informasi bawaan dari institusi pencipta alias pemilik sebelumnya (E, 2019). Untuk melacak informasi dalam foto itu tim ANRI biasanya melakukan wawancara ke pihak-pihak di organisasi pencipta arsip foto tersebut. Usaha ini tentunya memakan waktu yang tidak singkat.

Ketika arsiparis menemukan permasalahan tersebut, banyak yang kesulitan sehingga arsip tersebut kerap tertunda untuk dideskripsi dan kondisi ini membuat arsip tidak terdeskripsi itu pun ditangguhkan untuk bisa diakses publik. Dengan ditangguhkannya arsip tersebut untuk bisa diakses maka informasi berharga yang

terkandung dalam arsip tersebut menjadi tidak dapat tersebarluaskan.

Untuk permasalahan teknis pertama, Pusat SIKN-JIKN menginisiasi program magang dengan bermitra dengan Jurusan Kearsipan (Diploma IV) Universitas Terbuka dan Departemen Manajemen Informasi dan Dokumentasi (Diploma III) Universitas Indonesia. Mahasiswa dari kedua universitas tersebut kemudian magang di beberapa simpul yang ditunjuk oleh Pusat SIKN-JIKN untuk membantu simpul agar arsipnya dapat tersaji secara layak di dalam SIKN-JIKN. Strategi lainnya yang menjadi referensi bagi pihak ANRI dan institusi kearsipan lainnya adalah dengan memberikan pelatihan bahasa asing tertentu kepada arsiparis (D, 2019) atau merekrut jasa penerjemah swasta (D2, 2019). Sementara itu, untuk permasalahan teknis kedua, Pusat SIKN-JIKN menggandeng Masyarakat Sejarah Indonesia dan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia agar arsip di dalam SIKN-JIKN dapat dimanfaatkan secara lebih optimal oleh kedua kelompok ini, khususnya terkait dengan penulisan sejarah dan pembelajaran sejarah.

Pilihan-pilihan strategi pemecahan masalah ini tentunya perlu untuk terus diperkaya agar kesinambungan berjalannya SIKN-JIKN dapat terjamin. Terjaminnya kesinambungan SIKN-JIKN akan berdampak pada sejauhmana keberhasilan visi institusi kearsipan, khusus ANRI dalam mengintegrasikan memori kolektif bangsa dapat tercapai.

Pada uraian ini terlihat jelas bahwa dari pilihan-pilihan strategi yang ada, konsep *crowdsourcing* belum menjadi referensi atau alternatif pilihan yang digunakan oleh ANRI atau pun institusi kearsipan lainnya.

Crowdsourcing di Lembaga Kearsipan: Arsip Nasional Singapura (ANS) dan Gereja *Latter-Day Saints* (LDS)

Jika menilik institusi kearsipan lain dalam mengatasi permasalahan filosofis dan teknis ini, ada benang merah antara meraka yakni konsep *Crowdsourcing*. Dalam artikel ini hanya akan dideskripsikan dua contoh yang menurut peneliti relevan dan populer. Pertama, program *Citizen Archivist* yang dimiliki oleh Arsip Nasional Singapura (ANS). Kedua, *familysearch* yang dimiliki oleh *Latter Day Saints Church* (LDS).

Program *Citizen Archivist* di NAS diluncurkan sejak 2015. Program utamanya terdiri dari: *Transliterate newspaper* (Transliterasi Koran/Surat Kabar), *Transcribe and Transliterate record label* (Transkripsi dan Transliterasi Label Arsip), *Transcribe Audio* (Transkripsi Audio), *Annotate e-book* (Anotasi Buku Elektronik), Describe photographs (Deskripsi Foto), *Transcribe documents* (Transkripsi Dokumen) (Huang & Khoo, 2018,). Berdasarkan data per September 2018, tercatat 29.621 item, 760 item/bulan, deskripsi fotografi yang lengkap sebanyak 1.865 foto dan transkripsi dokumen yang lengkap sebanyak 28.075 halaman (Huang & Khoo, 2018). Dari keseluruhan aktivitas paling popular adalah transkripsi dokumen dengan jumlah terselesaikan sebanyak 26 dokumen per hari (Huang & Khoo, 2018).

Gambar 2. Tampilan Situs Citizen Archivist NAS
Sumber: http://www.nas.gov.sg/citizenarchivist

Selanjutnya, program *familysearch* yang dimiliki oleh LDS, melalui institusi arsip geneologi (*Genealogical Society of Utah*). Program arsip geneologi ini sendiri melalui *crowdsourcing* non-online sudah berlangsung sejak 1894. Namun, penggunaan *crowdsourcing* melalui online yang dapat meregistrasi pihak umum diluar anggota gereja baru dimulai pada kisaran tahun 2013. Program utama dari *familisearch* ini meliputi *family records* (Arsip Keluarga), *family tree* (Pohon Keluarga), transcription and indexing (Transkripsi dan indeksing) (familysearch, 2019). Berdasarkan data dari *www.familysearch.org*, hingga 2019 tercatat 6 milyar arsip keluarga yang bisa dicari melalui *familysearch.org*. Maka tidak heran, pihak LDS mengklaim bahwa *familiysearch* adalah portal arsip geneologi terbesar di dunia hingga saat ini. Sebagai informasi, peneliti menjadi salah seorang yang teregistrasi dalam situs tersebut.

Pada bagian ini terlihat, melalui *crowdsourcing* yang diaplikasikan oleh NAS dan LDS mampu mendorong keterlibatan publik sehingga masalah yang dihadapi oleh mereka teratasi serta pula membuat capaian-capaian kinerja institusi kearsipan pun terpenuhi baik secara filosofis maupun teknis.

Crowdsourcing: Menjembatani antara Negara dan Masyarakat dalam Konstruksi Kolektri Memori

Kegandrungan institusi kearsipan dengan memori kolektif terdeteksi sudah sejak lama. Maka tidak heran institusi kearsipan juga diidentikan sebagai insitusi memori. Persoalannya, memang arsip membentuk dan mengarahkan memori kolektif, namun arsip atau catatan peristiwa yang tersimpan dalam institusi kearsipan tidak otomatis adalah memori kolektif. (Cook & Schwartz, 2002). Membutuhkan proses interaksi berbagai pihak dalam masyarakat maupun antar masyarakat

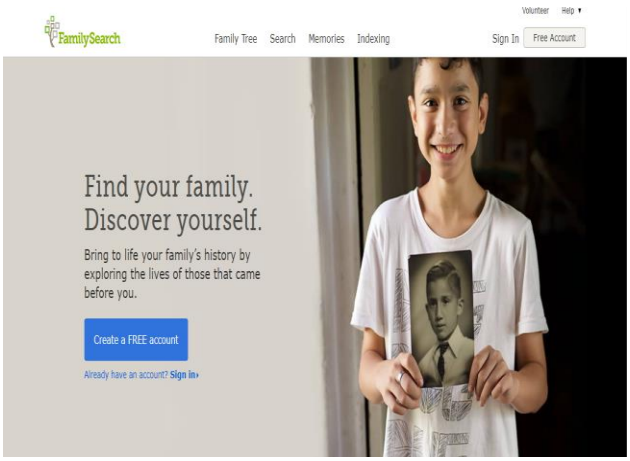

Gambar 3. Tampilan Situs *familysearch.org*
Sumber: *familysearch.org*

dengan negara sehingga memori kolektif sebuah masyarat terbentuk (Cook & Schwartz, 2002) (Neiger, et al., 2011).

Memori kolektif memiliki karakteristik sebagai berikut (Neiger, et al., 2011):

1) Memori kolektif adalah produk kontruksi sosial-politik;
2) Proses kontruksi memori kolektif berlangsung terus menerus, terjadi melalui proses multidireksional;
3) Memori kolektif bersifat fungsional;
4) Memori kolektif harus dapat diwujudkan secara konkret;
5) Memori kolektif bersifat narasional.

Memori kolektif adalah produk kontruksi sosial-politik. Memori kolektif tidak terbentuk serta merta, tapi ada negosiasi, perjuangan, partisipasi dan representasi berbagai pihak dalam proses pengingatan dan pelupaan (Foote, 1990) (Assman, 2008). Karena berkenaan dengan proses pengingatan dan pelupaan maka dia adalah mekanisme sosial-politik.

Proses kontruksi memori kolektif berlangsung terus menerus, terjadi melalui proses multidireksional. Proses terbentuk dan terpeliharanya memori kolektif membutuhkan kerja panjang dan kolaborasi berbagai agensi dalam masayarakt, misalnya institusi memori (arsip, perpustakaan, dan museum), insitusi pendidikan, insitusi control sosial (tentara dan polisi), institusi agama, termasuk juga masyarakat sipil (komunitas-komunitas). Skema interaksi selalu multidireksional alias berbagai arah, ada penerimaan, ada perlawanan, saling mengoreksi, saling mengendalikan.

Memori kolektif bersifat fungsional. Memori kolektif diciptakan dan dipertahankan untuk sesuatu yang sangat pragmatis, yakni penguatan sentimen antara anggota komunitas, atau dalam skala makro antara anggota masyarakat dalam suatu negara sehingga merasa sebagai satu kesatuan.

Memori kolektif harus dapat diwujudkan secara konkret. Memori kolektif

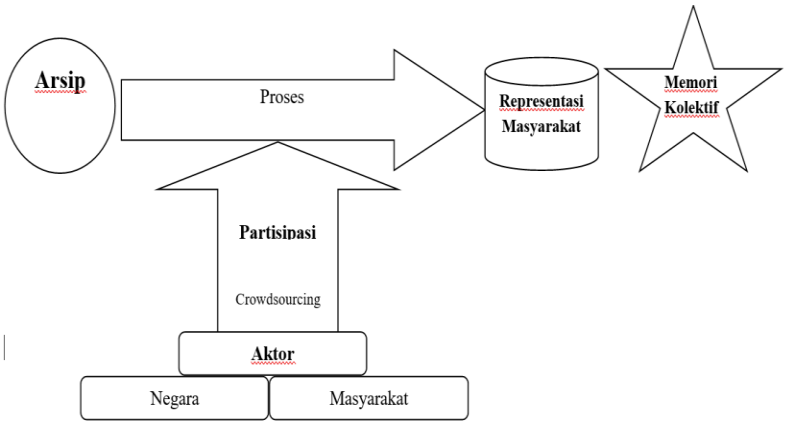

Gambar 4. Relasi Arsip, Crowdsourcing dan Memori Kolektif

Sumber: Data diolah oleh Penulis

selain sebagai kumpulan ide, dia juga adalah sesuatu yang konkret. Ide abstrak kemudian diterjemahkan melalui, misalnya monumen (Monumen Pancasila Sakti yang diperuntukan bagi pengingatan peristiwa G30S/(PKI) atau ritual (upacara peringatan kemerdekaan yang dilaksanakan setiap tanggal 17 Agustus, diperuntukan bagi pengingatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia).

Memori kolektif bersifat narasional. Memori kolekitf selalu tentang kisah. Dia bukan serpihan dokumen atau informasi yang tersimpan, namun menyebar didalam benak anggota komunitasnya.

Pada posisi ini maka, arsip memerlukan mekanisme tertentu agar informasinya kemudian dapat diolah dalam proses konstruksi memori kolektif. Sebagaimana kasus ANS dan LDS, pada level teknis *crowdsourcing* yang diaplikasikan oleh mereka memungkinkan informasi arsip dapat terhimpun, ditranskripsikan, ditransliterasikan, diterjemahkan sehingga dapat dideskripsikan oleh masyarakat dan kemudian tersebar melalui akses publik.

Sederhananya, bagaimana mungkin ketika informasi dalam suatu arsip tidak terdeskripsi lalu kemudian berproses menjadi memori kolektif? Maka melalui *crowdsourcing* semua pihak baik negara maupun masyarakat dimungkinkan untuk dapat membuat informasi pada suatu arsip terdeskripsi lengkap sehingga proses untuk kemudian menjadi memori kolektif dapat dilakukan.

Crowdsourcing menjadi medium karena memberikan ruang partisipasi khususnya bagi publik untuk turut serta menjadikan arsip berproses menjadi memori kolektif. Sehingga dalam proses ini, memori kolektif yang terkonstruksi merupakan juga adalah representasi publik (Katiambo & Ooko, 2017) (Eveleigh, 2012). Pada posisi ini pula memori kolektif yang selama ini di dominasi oleh aktor negara, melalui *crowdsourcing* menjadi sebuah produk yang dihasilkan bersama oleh negara dan

masyarakat. Untuk lebih sederhana dapat dilihat pada Gambar 4.

Maka dapat digarisbawahi bahwa konsep *crowdsourcing* yang dikembangkan menjadi perangkat teknologi *crowdsourcing* dapat menjadi jembatan bagi negara dan masyarakat untuk sama-sama berperan dalam mengupayakan arsip sehingga dapat diberdayakan dalam proses kontruksi memori kolektif.

Relevansi Pengembangan Konsep dan Praktek *Crowdsourcing* dalam Konteks Indonesia

Pada konteks Indonesia, peneliti menemukan 3 (tiga) basis yang dapat dijadikan dasar untuk menjelaskan relevansi pengembangan konsep dan praktek *crowdsourcing,* yakni basis legal, basis ilmiah dan basis sosiologis. Basis legal merujuk pada kerangka hukum/regulasi di Indonesia itu sendiri. Basis ilmiah merujuk pada perkembangan ilmu kearsipan (*archival science/archival studies*). Basis sosiologis merujuk pada kondisi dan perkembangan masyarakat Indonesia.

Basis legal. Peran serta masyarakat dalam bidang kearsipan dijamin oleh UU No.43/2009 tentang Kearsipan, misalnya pada Pasal 14 (1) yang menegaskan tentang sistem JIKN yang diperuntukan bagi peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang kearsipan. Selain itu, ditemukan pula pada Pasal 71 UU No.43/2009 tentang Kearsipan, berkenaan dengan jaminan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kearsipan.

Basis ilmiah. Belakangan aksi-aksi pengarsipan tidak lagi menjadi dominasi negara atau organisasi formal melainkan terbuka bagi siapapun termasuk individu maupun komunitas-komunitas dalam masyarakat. Dapat dikatakan saat ini adalah era ketika demokratisasi ataupun desentralisasi proses-proses pengarsipan tengah marak. Fenomena ini secara konseptual dikenal sebagai *participatory archives* (Huvila, 2008). Dalam konteks masyarakat yang semakin mendigital, tumbuh suatu kondisi yang disebut sebagai *Cognitive Surplus* (Shirky, 2010). Pada era digital ini, teknologi internet memungkinkan masyarakat saat ini untuk memanfaatkan waktu luangnya guna melakukan kegiatan yang berdampak bagi komunitasnya. Orang-orang ini relatif tidak mengharapkan imbalan dalam pemanfaatan waktu luangnya tersebut. Misalnya mereka menghimpun donasi melalui kitabisa.com, membuat konten video pelatihan yang bisa diakses siapa saja secara gratis via youtube dan masih banyak lagi.

Basis sosiologis**.** Indonesia memiliki *Internet Penetration Rate* sebesar 64,8% dengan pertumbuhan pengguna internet sebesar 10% dalam periode satu tahun (2017-2018) (Assosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2018). Data ini tentunya menggambarkan situasi yang sangat positif bagi pemanfaatan dan penguatan *cognitive surplus*. Selain itu, gerakan *participatory archives* juga mulai menjamur, arsip komunitas mengorganisasikan diri dalam sebuah jaringan bernama Jaringan Arsip Budaya

Nusantara (JABN) (Bawono, 2018,), belum lagi komunitas pecinta sejarah, salah satunya, Masyarakat Komunitas Historia Indonesia.

Setelah memahami pengembangan *crowdsourcing* di bidang kearsipan secara empirik memiliki dasar relevansinya di Indonesia, maka selanjutya persoalan apa saja yang harus diperhatikan ketika ingin mengaplikasikan konsep *crowdsourcing* ini?

Terdapat 4 (empat) hal utama yang harus diperhatikan yakni *What to crowdsource, Who is the crowd, How to crowdsource, How to incentivize* (Simperl, 2015).

What to crowdsource. Pekerjaan apa yang akan di *crowdsources*? dalam bidang kearsipan contohnya sebagaimana yang telah dilakukan oleh ANS melalui *citizen archivist* transkripsi, transliterasi, indeksing dan lainnya atau oleh LDS melalui familysearch dengan menghimpun dan mendeskripsi arsip sisilah keluarga/geneologi.

Who is the crowd. Target kerumunan yang dituju untuk dapat membantu pekerjaan sebagaimana yang dirumuskan dalam *what to crowdsource*. Dalam bidang kearsipan misalnya arsip komunitas, komunitas sejarah atau komunitas kepakaran lainnya.

How to crowdsource. Cara *crowdsource* dilakukan meliputi sistem yang digunakan untuk mengumpulkan hasil *crowdsource*, sistem pelibatan/registrasi, sistem evaluasi yang dapat menghalangi spam masuk, sistem pengendalian kualitas hasil kerja *crowdsourced* dan lainnya.

How to incentivize. Meskipun publik yang berparitipasi dalam *crowdsource* ini dalam kepentingan menyalurkan *cognitive surplus* mereka, penting untuk memberikan skema insentif, tidak selalu material, namun apa saja yang menunjukkan pengharaan atas kerja sukarela mereka itu. Pemberian intensif ini dilakukan sebagai upaya rekognisi agar ikatan emosional antara masyarakat dengan negara via lembaga kearsipan terbentuk kuat.

Dari uraian ini terlihat baik konsep maupun praktek *crowdsourcing* di bidang kearsipan dari segi legal, ilmiah dan sosiologis menemukan relevansinya untuk dikembangkan dan diaplikasikan di Indonesia.

Pilihan Pengembangan *Crowdsourcing* di ANRI

Berdasarkan data temuan peneliti, terdapat 4 (empat) skema yang dapat dipilih untuk mengembangkan *crowdsourcing* di ANRI, yaitu:

a. Integrasi dengan SIKN-JIKN;
b. Integrasi dengan Sistem Kearsipan Statis (SIKS)/Pengelolan Elektronik (e-Pengolahan);
c. Integrasi dengan website ANRI;
d. Sistem baru.

Integrasi dengan SIKN-JIKN. Lembaga kearsipan nasional dalam hal ini ANRI memiliki infrastruktur digital yang sangat berpotensi untuk dapat memobilisasi dan mengkoneksikan antara insitusi kearsipan dan agensi pencipta seantero Indonesia yakni SIKN-JIKN. Namun, sebagaimana diulas, tentunya diperlukan

pengembangan lebih lanjutnya sehingga melalui SIKN-JIKN masalah filosofis dan teknis yang dihadapi oleh ANRI dan juga insitusi arsip di Indonesia dapat terselesaikan.

Pengintegrasian *crowdsourcing* dalam SIKN-JIKN, memiliki *feasibilitas* yang tinggi karena *open source* (perangkat lunak dan kode-sumber), karena itu pengembangan terhadap SIKN-JIKN bisa sangat fleksibel (B, 2019). Hal ini juga berdampak pada usaha pengembangan yang tidak terlalu fundamental alias mikro. Tentunya selama ada sumber daya yang mendukung untuk pengembangan itu. Selain itu, dalam SIKN-JIKN anggota simpul nantinya juga dapat menikmati keuntungan penggunaan *crowdsourcing* ini. Kendati demikian, penting untuk diperhatikan, salah satu informan menyampaikan bahwa SIKN-JIKN hingga saat ini dikonsepkan sebagai instrumen untuk menyajikan arsip yang sudah siap diakses oleh publik (A, 2019). Dengan demikian, sistem *crowdsourcing* ini lebih cocok dilakukan melalui *website* ANRI ataupun SIKS atau juga e-Pengolahan.

Integrasi dengan Sistem Informasi Kearsipan Statis: SIKS)/Pengelohan Elektronik(e-Pengelohan)**.** SIKS adalah sistem pengelolaan arsip elektronik yang saat ini sedang dikembangkan oleh ANRI. Jika dilihat dari segi feasibilitas, terbilang medium karena pengembangnya adalah ahli dari ANRI sendiri. Sementara itu, e-Pengolahan adalah aplikasi pengolahan arsip ANRI. Sistem ini yang saat masih dalam tahap pengembangan oleh pihak ke-tiga. Sebagaimana SIKS, sistem ini juga butuh pengembangan besar (*macro improvement*). Selain itu, sistem ini relatif hanya berfokus pada ANRI.

Integrasi dengan *Website* ANRI. Sistem ini dikembangkan oleh tim ANRI sehingga dari segi feasibilitas terbilang medium untuk pengembangan dengan menanamkan *crowdsourcing*. Kendati demikian, dibutuhkan pengembangan yang makro. Selain itu, sistem ini juga hanya untuk kebutuhan internal ANRI.

Sistem baru. Pengembangan sistem sama sekali baru dapat dikatakan memiliki feasibilitas kecil. Karena membutuhkan sumber daya yang relatif besar.

Dari analisa ini, terlihat bahwa masing-masing skema memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. Namun demikian ada skema dengan prospek feasibilitas paling besar. Selanjutnya adalah memilih salah satu dari 4 (empat) skema tersebut, tiap alternatif pilihan membawa pada konsekuensi yang berbeda-beda pula.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bagian hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan:

- *Crowdsourcing* baik secara konsep maupun praktek relevan untuk dikembangkan di Indonesia dalam rangka membantu upaya memujudkan upaya pengintegrasian kolektif memori, sebagaimana divisikan oleh ANRI;
- Pengembangan dan pengimplementasian *crowdsourcing* ini sangat berpotensi untuk dapat mengatasi baik masalah

filosofis maupun praktis. Kekuatan sistem ini adalah mampu memobilisasi partisipasi publik untuk menyalurkan *cognitive surplus* dalam berpartisipasi demi memecahkan masalah kearsipan melalui ruang-ruang digital.

- Terdapat beberapa skema yang dapat diambil untuk mengimplementasikan konsep ini, namun akan lebih baik jika memilih skema dengan tingkat *feasibilitas* yang tinggi dan relatif sudah mapan berjalan hingga saat ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada ANRI khususnya Unit Kerjasama, karena berkat sponsor yang diberikan, peneliti dapat mempresentasikan penelitian ini dalam forum *Sarbica International Sysmposium* pada 24-27 Juni 2019 di Arsip Nasional Singapura.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Assman, A., 2008. Transformations between History and Memory. *Social Research*, 75(1), pp. 49-72.

Bawono, H., 2018. (2017), Encouraging the Participation of Archival Institutions in Protecting and Preserving Traditional Knowledge: a Reflection on the Indonesian Case. *Letonica Journal*, Volume 36, pp. 9-20

Cook, T. & Schwartz, J. M., 2002. Archives, Records and Power: The Making of Modern Memory. *Archival Science*, Volume 2, pp. 1-19

Ellis, S., 2014. A Historical Collaboration, a Future Crowdsourcing: Positive Impacts of Cooperation on British Librarianship. *Libri*, 1(64), pp. 1-10

Foote, K. E., 1990. To Remember and Forget: Archives, Memory, and Culture. *The American Archivists*, 53(3), pp. 378-392

Huvila, I., 2008. Participatory Archive: Towards Decentralised Curation, Radical User Orientation, and Broader Contextualisation of Records Management. *Archival Science*, 8(1), pp. 15-36

Katiambo, D. & Ooko, G., 2017. Reconstructing Collective Memory through Participatory Approaches: a Study of Transparency International-Kenya's Citizen Demand Programme. *Journal of Development and Communication Studies*, 5(1), pp. 78-97

Lundgren, T. D. & Lundgren, C. A., 1989. *Records Management in the Computer Age.* Boston: PWS-Kent Publishing Co.

Neiger, M., Meyers, O. & Zandberg, E., 2011. *On Media Memory: Collective Memory in a New Media Age*,. - ed. London: Palgrave Macmillan.

Simperl, E., 2015. How to Use Crowdsourcing Effectively: Guidelines and Examples. *Liber Quarterly*, 25(1), p. 18–39.

Wawancara

Informan A, 2019. *Sejarah Pengembangan SIKN-JIKN* [Interview] (8 Februari 2019).

Informan B, 2019. *Pengembangan SIKN-JIKN* [Interview] (14 Mei 2019).

Informan C, 2019. *Hasil Akreditas Lembaga Kearsipan dan Reformasi Birokrasi* [Interview] (31 Mei 2019).

Informan D, 2019. *Strategi Deskripsi Arsip Berbahasa Asing Non-Belanda dan Non-Inggris* [Interview] (22 Mei 2019).

Informan D2, 2019. *Strategi Deskripsi Arsip Bahasa Asing Non-Belanda dan Non-Inggris* [Interview] (22 Mei 2019).

Informan E, 2019. *Masalah Deskripsi Arsip* [Interview] (26 April 2019).

Informan F, 2019. *Arsip Berbahasa Asing Non-Belanda dan Non-Inggris* [Interview] (10 Juni 2019).

Peraturan Perundang-undangan

Republik, Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan*. Lembaran Negara RI Tahun 2009. Jakarta: Sekretariat Negara.

------. 2003. *Instruksi Presiden tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan* E-Government 2003.

Arsip Nasional Republik Indonesia.2015. *Peraturan Kepala ANRI Nomor 40 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Anri Tahun 2015-2019*.

------.2017. *Peraturan Kepala ANRI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip.*

WebPage

Assosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2018. *Laporan Internet Service Provider Association,* Jakarta: APJII.

Eveleigh, A., 2012. *Welcoming the World: An Exploration of Participatory Archives,* Brisbane: International Council of Archives.

familysearch, 2019. *about: familysearch.* [Online] Available at: https://www.familysearch.org/home/about [Accessed 24 Mei 2019].

Huang, A. & Khoo, C., 2018. *The Citizen Archivist Project Journey in Singapore* , Singapura: National Archives of Singapore.

katadata, 2019. *datapublish: katadata.co.id.* [Online] Available at: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/04/jumlah-penduduk-indonesia-2019-mencapai-267-juta-jiwa [Accessed 24 Mei 2019].

Lau, L. J., 2003. *Economic Growthin the Digital Era,* Taipei: Kwoh-Ting Li Forum.

Pajata, C. R., 2018. *beritasatu.com:nasional.* [Online] Available at: https://www.beritasatu.com/nasional/

518222/2019-bakal-dapat-dana-ini-total-kelurahan-di-indonesia [Accessed 24 Mei 2019].

Pratiwi, D., 2018. *Penyelenggaraan SIKN-JIKN,* Jakarta: Pusat SIKN-JIKN.

Pratiwi, D., No Year. *The Indonesian Archival Information System (SIKN) and The Indonesian Archival Information Network (JIKN),* Jakarta: Pusat SIKN-JIKN.

Shirky, C., 2010. *How Cognitive Surplus Will Change the World,* -: TED.